



157.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 152 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2009;
29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
31. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2009 terdiri atas :

**a. Pendapatan**

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	10.601.057.958.783,28	
2. Dana Perimbangan	Rp	8.650.835.929.772,00	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	10.787.700.000,00	
Jumlah Pendapatan			Rp 19.262.681.588.555,28

**b. Belanja**

1. Belanja Tidak Langsung			
a) Belanja Pegawai	Rp	5.874.593.713.845,00	
b) Belanja Bunga	Rp	9.943.209.211,00	
c) Belanja Subsidi	Rp	0,00	
d) Belanja Hibah	Rp	305.274.309.265,00	
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	58.020.461.866,00	
f) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00	
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	598.357.277,00	
h) Belanja Tidak Terduga	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp 6.248.430.051.464,00
1. Belanja Langsung			
a) Belanja Pegawai	Rp	1.672.829.080.633,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	6.773.237.463.833,06	
c) Belanja Modal	Rp	4.816.602.834.892,00	
Jumlah Belanja Langsung			Rp 13.262.669.379.358,06
Jumlah Belanja			Rp 19.511.099.430.822,06
Defisit			(Rp 248.417.842.266,78)

c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	Rp	4.446.373.058.586,11	
2. Pengeluaran	Rp	441.237.187.873,00	
Jumlah Pembiayaan Neto			Rp 4.005.135.870.713,11
		Jumlah	Rp 3.756.718.028.446,33
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor ke Kas BUD		(Rp	8.205.881.148,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		Rp	3.748.512.147.298,33

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2010

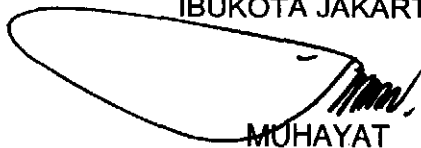
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT

NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 157

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6=4:3
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3.1.1	Penggunaan SILPA	4,446,373,058,586.00	4,446,373,058,586.11	0.11	100.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	150,000,000,000.00	0.00	(150,000,000,000.00)	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	-
3.1.5	Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	-
	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>4,596,373,058,586.00</b>	<b>4,446,373,058,586.11</b>	<b>(149,999,999,999.89)</b>	<b>96.74</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	70,153,127,273.00	70,153,127,273.00	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	238,464,896,950.00	238,464,896,483.00	(467.00)	100.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	24,700,000,000.00	24,683,619,363.00	(16,380,637.00)	99.93
3.2.4	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	28,436,238,116.00	28,217,069,754.00	(219,168,362.00)	99.23
3.2.5	Pembayaran Utang TPP Kepada PNS/CPNS	21,000,000,000.00	18,968,475,000.00	(2,031,525,000.00)	90.33
3.2.6	Pemberian Pinjaman Daerah	60,750,000,000.00	60,750,000,000.00	0.00	100.00
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>373,351,135,066.00</b>	<b>441,237,187,873.00</b>	<b>67,886,052,807.00</b>	<b>118.18</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>4,223,021,923,520.00</b>	<b>4,005,135,870,713.11</b>	<b>(217,886,052,806.89)</b>	<b>94.84</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>3,756,718,028,446.33</b>		

Jakarta, September 2010  
 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

1 Catatan  
 SILPA sebesar Rp3.756.718.028.446,33 termasuk Sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran Kota Administrasi Jakarta Barat yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp.8.205.881.148,00 yang akan di reklas setelah ada keputusan

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2009

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4:3	6=4:3
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8,615,000,000,000.00	8,560,134,926,182.00	(54,865,073,818.00)	99.36
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	384,640,000,000.00	416,896,030,531.45	32,256,030,531.45	108.39
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipsahkan	180,000,000,000.00	181,130,584,183.00	1,130,584,183.00	100.63
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	1,183,795,508,395.00	1,442,896,417,886.83	259,100,909,491.83	121.89
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>10,363,435,508,395.00</b>	<b>10,601,057,958,783.28</b>	<b>237,622,450,388.28</b>	<b>102.29</b>
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	8,978,400,000,000.00	8,580,181,348,268.00	(398,218,651,732.00)	95.56
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	30,000,000,000.00	70,654,581,504.00	40,654,581,504.00	235.52
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	-
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	-
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>9,008,400,000,000.00</b>	<b>8,650,835,929,772.00</b>	<b>(357,564,070,228.00)</b>	<b>96.03</b>
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	-
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>9,008,400,000,000.00</b>	<b>8,650,835,929,772.00</b>	<b>(357,564,070,228.00)</b>	<b>96.03</b>
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>				
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	10,787,700,000.00	10,787,700,000.00	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	-
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>0.00</b>	<b>10,787,700,000.00</b>	<b>10,787,700,000.00</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>19,371,835,508,395.00</b>	<b>19,262,681,588,555.28</b>	<b>(109,153,919,839.72)</b>	<b>99.44</b>

**PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4:3	6=4:3
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>				
2.1.1	Belanja Pegawai	8,371,982,597,330.00	7,547,422,794,478.00	(824,559,802,852.00)	90.15
2.1.2	Belanja Barang	8,064,561,114,430.20	6,773,237,463,833.06	(1,291,323,650,597.14)	83.99
2.1.3	Belanja Bunga	9,946,000,000.00	9,943,209,211.00	(2,790,789.00)	99.97
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	-
2.1.5	Belanja Hibah	338,996,929,283.00	305,274,309,265.00	(33,722,620,018.00)	90.05
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	70,662,500,000.00	58,020,461,866.00	(12,642,038,134.00)	82.11
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	677,500,000.00	598,357,277.00	(79,142,723.00)	88.32
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>16,856,826,641,043.20</b>	<b>14,694,496,595,930.06</b>	<b>(2,162,330,045,113.14)</b>	<b>87.17</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>				
2.2.1	Belanja Tanah	2,484,749,362,435.00	1,574,898,884,529.00	(909,850,477,906.00)	63.38
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	1,518,962,928,766.80	1,151,718,217,654.00	(367,244,711,112.80)	75.82
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	1,761,970,098,227.00	1,406,444,458,495.00	(355,525,639,732.00)	79.82
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	770,528,319,717.00	565,449,291,331.00	(205,079,028,386.00)	73.38
2.2.4	Belanja Aset Tetap Lainnya	145,124,058,786.00	118,091,982,883.00	(27,032,075,903.00)	81.37
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>6,681,334,767,931.80</b>	<b>4,816,602,834,892.00</b>	<b>(1,864,731,933,039.80)</b>	<b>72.09</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	56,696,022,940.00	0.00	(56,696,022,940.00)	-
	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>56,696,022,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(56,696,022,940.00)</b>	<b>-</b>
<b>2.4</b>	<b>Transfer</b>				
2.4.1	Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	-
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	-
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	-
	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>23,594,857,431,915.00</b>	<b>19,511,099,430,822.06</b>	<b>(4,083,758,001,092.94)</b>	<b>82.69</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(4,223,021,923,520.00)</b>	<b>(248,417,842,266.78)</b>	<b>3,974,604,081,253.22</b>	<b>5.88</b>

**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**

Hal. 14294 dari 14294

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.26 PERPUSTAKAAN											
ORGANISASI : 1.26.007 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - Kep. Seribu 6.21.02.00.0000.000											
KODE REKENING		URAIAN		Angg. Setelah Perubahan		Realisasi		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
1		2		3		4		5		6	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				0.00		0.00		0.00			
1.26	007			5	2					BELANJA LANGSUNG	
1.20	007	04								100,000,000.00	0.00
1.20	007	04	076							100,000,000.00	0.00
1.20	007	04	076	5	2	1				100,000,000.00	0.00
1.20	007	04	076	5	2	1				94,500,000.00	0.00
1.20	007	04	076	5	2	1	01			94,500,000.00	0.00
1.20	007	04	076	5	2	1	01	01		94,500,000.00	0.00
1.20	007	04	076	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	
1.20	007	04	076	5	2	2	01			5,500,000.00	0.00
1.20	007	04	076	5	2	2	01	09		1,500,000.00	0.00
1.20	007	04	076	5	2	2	11			1,500,000.00	0.00
1.20	007	04	076	5	2	2	11	01		2,000,000.00	0.00
1.20	007	04	076	5	2	2	20			2,000,000.00	0.00
1.20	007	04	076	5	2	2	20	27		2,000,000.00	0.00
<b>JUMLAH BELANJA</b>				100,000,000.00		0.00		0.00		100,000,000.00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				(100,000,000.00)						(100,000,000.00)	

Jakarta, September 2010  
**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS**  
**IBUKOTA JAKARTA,**

  
**FAUZI BOWO**